



BAB II
KELOMPOK PERGERAKAN NASIONALIS SEKULER
SAMPAI DENGAN AWAL DASAWARSA TAHUN 1930-AN
DAN ORDONANSI “SEKOLAH LIAR” TAHUN 1932

**A. Dinamika Pergerakan Nasionalis Sekuler Sampai Dengan Awal Dasawarsa
Tahun 1930-an**

Kelompok pergerakan nasionalis sekuler merupakan salah satu bagian dari sebuah proses pergerakan nasional yang dilakukan oleh kaum bumiputra di Hindia Belanda. Kelompok pergerakan nasionalis sekuler muncul pada pertengahan dasawarsa tahun 1920-an. Mereka mengambil alih gerakan rakyat yang sebelumnya didominasi PKI dan SI.¹² Golongan nasionalis sekuler yang muncul setelah

¹² Pemerintah kolonial melarang dan menindak anggota PKI yang melakukan pemberontakan pada tahun 1926—1927. Sementara itu, SI pada pertengahan dasawarsa tahun 1920-an kekuatannya berkurang drastis akibat perpecahan yang timbul sebelumnya. Munculnya golongan tersebut mengalihkan perhatian pemerintah kolonial dari golongan komunis kepada golongan nasionalis sekuler. Hal ini dapat dilihat dari presentase isi Ikhtisar Politik dan Kepolisian (*Politiek-Politioonele Overzichten*) pada tahun 1927—1928 yang menggambarkan penurunan perhatian pemerintah terhadap gerakan komunis dan meningkatnya perhatian terhadap golongan nasionalis sekuler. Lihat: Mirjam Maters, *op.cit.*, hal. 239—240.

pemberontakan PKI tahun 1926—1927 adalah orang-orang bumiputra yang sudah selesai masa studinya di negeri Belanda dan juga pelajar bumiputra di sekolah tinggi lokal di Hindia Belanda. Mereka mempunyai ide untuk membentuk suatu gerakan baru yakni gerakan kebangsaan yang tidak berdasarkan agama dan sifat kedaerahan serta lepas dari pengaruh paham komunis. Pelopor dari ide tersebut adalah mahasiswa bumiputra yang telah kembali dari negeri Belanda pada pertengahan tahun 1923.¹³ Mereka mendirikan berbagai kelompok studi sebagai tempat berkumpul untuk bertukar pikiran. Kelompok studi yang pertama kali didirikan adalah Kelompok Studi Indonesia (*Indonesische Studieclub*) di Surabaya yang dibentuk oleh Soetomo pada tanggal 11 Juli 1924.¹⁴

Pendirian Kelompok Studi Indonesia kemudian diikuti oleh pendirian berbagai kelompok studi di tempat lainnya. Salah satu kelompok studi yang menonjol adalah Kelompok Studi Umum (*Algemeene Studieclub*) di Bandung yang didirikan oleh mantan anggota PI bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis Bandung beserta mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Bandung pada tanggal 29 November 1925.¹⁵

¹³ Mereka yang tertarik kepada aktifitas politik adalah mahasiswa-mahasiswa yang pada saat di negeri Belanda tergabung ke dalam organisasi perkumpulan mahasiswa Indonesia, Perhimpunan Indonesia (PI) atau sebelumnya bernama *Indonesische Vereeniging*. Ketika pulang ke Hindia Belanda pada pertengahan tahun 1923, mereka tinggal di tiga kota besar di Jawa (Batavia, Bandung, dan Surabaya) yang menyediakan pekerjaan sesuai dengan profesi mereka. Di antara golongan terpelajar tersebut, ada yang kecewa dengan partai dan organisasi yang sudah ada. Mereka menilai banyak partai atau organisasi tersebut didasarkan pada sesuatu yang sempit. Lihat: John Ingleson, *op.cit.*, hal. 20.

¹⁴ Soetomo merupakan mantan anggota PI di Amsterdam pada tahun 1919 sampai dengan tahun 1922. Pada saat aktif di PI, ia merupakan penggerak dalam perubahan perkumpulan tersebut dari *Indische Vereeniging* menjadi PI pada tahun 1922. Lihat: Paul w. van der veur (ed.), *Kenang-kenangan dokter soetomo* (Jakarta, 1984), hal. 47—48.

¹⁵ Tokoh-tokoh pendiri kelompok studi ini adalah Isqaq Tjokroadisoerjo (pengacara didikan Leiden yang kembali ke Indonesia pada bulan September 1925), Tjipto Mangoenkoesoemo, Sartono dan dua

Kedua kelompok studi itu kemudian berkembang dan menjadi daya tarik bagi mantan anggota PI serta kaum muda terpelajar yang bangkit kesadaran politiknya.

Pemberontakan PKI yang gagal mendorong golongan nasionalis sekuler untuk mencari bentuk organisasi politik baru berasas nonkooperasi yang dapat bergerak mencari massa untuk aksi-aksi menentang pemerintah melalui gerakan massa sadar politik. Inisiatif untuk mendirikan organisasi tersebut muncul dari Kelompok Studi Umum di Bandung yang lebih radikal bila dibandingkan dengan Kelompok Studi Indonesia. Kedua kelompok studi tersebut pada dasarnya memang terdapat perbedaan.

Perbedaan tersebut terletak pada karakter dan pemikiran taktik perjuangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.¹⁶ Kelompok Studi Umum yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk masalah-masalah yang bersifat murni politik mengenai kemerdekaan lebih kuat berpegang kepada asas nonkooperasi sebagai suatu masalah prinsip yang tidak boleh dilanggar. Sedangkan Kelompok Studi Indonesia, yang lebih banyak mengkaji masalah-masalah yang lebih luas daripada hanya politik, berpandangan bahwa asas nonkooperasi merupakan sekedar senjata taktis terhadap pemerintah yang kemudian dapat berubah sesuai dengan tanggapan pemerintah. Oleh karena itu Kelompok Studi Indonesia dianggap sebagai

orang mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Bandung yaitu Soekarno dan Anwari. Lihat: John Ingleson, *op.cit*, hal. 21.

¹⁶ John Ingleson menganalisa perbedaan kedua kelompok studi tersebut. Lihat: *ibid.*, hal. 22—23.

golongan yang pada dasarnya lebih menginginkan gerakan yang bersifat kooperatif dengan pemerintah.¹⁷

Perbedaan ini pada dasarnya disebabkan oleh anggota yang tergabung dalam kedua kelompok studi tersebut. Kelompok Studi Indonesia terdiri dari orang-orang yang lebih heterogen pemikiran politiknya bila dibandingkan dengan Kelompok Studi Umum. Sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang bekerja di institusi pemerintah kolonial yang cenderung berhati-hati untuk berkonfrontasi langsung dengan pemerintah kolonial. Selain itu kelompok studi ini mempunyai hubungan yang cukup erat dengan Budi Utomo dan kebanyakan anggota dari klub studi ini mempunyai status keanggotaan yang rangkap dengan Budi Utomo, termasuk Soetomo sendiri.¹⁸

Berbeda dengan Kelompok Studi Umum yang terdiri dari orang-orang profesional dan mahasiswa. Mereka tidak tergantung kepada instansi pemerintah kolonial dan para mahasiswa bebas dari keterikatan partai politik atau perkumpulan lainnya. Kehadiran tokoh-tokoh nasionalis yang radikal seperti Tjipto Mangoenkoesoemo, serta tokoh pemuda yang sudah ditempa dengan semangat radikal seperti Soekarno dan Anwari dari Sekolah Tinggi Teknik, ditambah

¹⁷ Masalah asas pergerakan ini timbul sejak dibentuknya Dewan Rakyat (*Volksraad*) pada tahun 1918. Ketidaksiharian kenyataan dengan harapan setelah terbentuknya *Volksraad* membuat munculnya asas pergerakan yang lainnya yaitu nonkooperasi. Pengertian kooperasi secara umum adalah asas perjuangan kaum pergerakan yang bersedia bekerjasama dengan pihak pemerintah kolonial Belanda dalam usaha mencapai tujuan perjuangan. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam *Volksraad* dan dinas-dinas pemerintah lainnya. Sementara itu nonkooperasi adalah asas perjuangan yang tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial dalam usaha mencapai tujuan. Lihat: Soeharto, *Gerakan Rakyat Indonesia 1937—1942: Wajah Baru Pergerakan Nasionalis Indonesia* (Depok, 1996), hal.10—13.

¹⁸ Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Jakarta: 1984), hal. 296.

banyaknya mantan anggota PI yang tertarik pada semangat pergerakan nasional di Bandung, semakin mendorong Kelompok Studi Umum secara tegas untuk bergerak ke arah nonkooperasi.

Kelompok Studi Umum yang berubah menjadi partai nonkooperasi bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) kemudian menjalankan aksi-aksi agitasi politiknya sepanjang akhir dasawarsa tahun 1920-an.¹⁹ Selain itu, di bawah pimpinan Soekarno, PNI berhasil memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), sebuah badan persatuan antarorganisasi politik bumiputra.²⁰ Namun demikian, PNI tidak menarik seluruh mantan anggota PI ke dalam pangkuannya. Kelompok Studi Indonesia menolak masuk ke dalam partai baru tersebut karena banyak anggota klub itu, menjadi pegawai negeri, takut akan balas dendam pemerintah kolonial.²¹

Kegiatan Kelompok Studi Indonesia sampai dengan tahun 1930 masih dalam bentuk kelompok studi yang rutin membicarakan masalah sosial-ekonomi masyarakat bumiputra. Dalam bidang politik, Kelompok Studi Indonesia bergabung dalam

¹⁹ Pada tanggal 4 Juli 1927 dalam sebuah pertemuan, diputuskan pembentukan organisasi politik baru yang berhaluan nonkooperasi berupa partai politik yang bernama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Pada kongres pertamanya pada bulan Mei 1928 di Surabaya, kata perserikatan kemudian diganti menjadi kata partai, sehingga partai politik tersebut bernama Partai Nasional Indonesia (PNI). Lihat: John Ingleson, *op.cit.*, hal. 31—153.

²⁰ Badan federasi tersebut dibentuk dalam sebuah rapat yang diadakan pada tanggal 17—18 Desember 1927 di Sekolah Taman Siswa Bandung. Rapat itu dihadiri oleh wakil-wakil dari PSI, PNI, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranenbond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia. Pengurusnya berupa majelis pertimbangan yang terdiri dari Iskaq Tjokroadisoerjo sebagai ketua, Dr. Samsi menjadi sekretaris merangkap bendahara, Soekarno dan Soekiman yang menjadi anggota dari dewan tersebut. Lihat: *ibid.*, hal. 50—57; Upaya perwujudan badan federasi tersebut, mendapatkan bantuan dari Soekiman yang berasal dari PSI. Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900—1942* (Jakarta, 1996), hal. 271.

²¹ Malvis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: 1991), hal. 80.

PPPKI sebagai anggota. Pada kongres yang dilaksanakan pada bulan Juli 1928, Soetomo dari Kelompok Studi Indonesia terpilih menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PPPKI.²² Kepemimpinan Soetomo yang dianggap membawa harapan besar ternyata tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Soetomo sering kali melangkahi batas wewenang majelis pertimbangan seperti yang telah digariskan dalam anggaran dasar federasi.²³ Sikap saling curiga selalu menyertai dalam setiap rapat-rapat yang diselenggarakan oleh PPPKI, seperti yang terjadi dalam rapat pembentukan seksi lokal PPPKI di setiap daerah.²⁴

Memasuki dasawarsa tahun 1930-an, kelompok pergerakan nasionalis sekuler yang radikal, yakni PNI, terkena tindakan keras pemerintah kolonial akibat agitasi politiknya.²⁵ Gubernur Jenderal De Graeff sendiri sebenarnya seorang tokoh Belanda yang membuka pikirannya terhadap pemikiran etis. De Graeff menginginkan adanya

²² John Ingleson, *op.cit.*, hal. 78.

²³ Majelis pertimbangan tidak mempunyai kekuasaan eksekutif dan hanya bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan federasi dalam rapat-rapat kwartalan. Soetomo, dalam kepemimpinannya, mulai memasukkan pikiran-pikiran dan kecenderungan pribadinya kepada federasi. Hal ini kemudian menjadi salah satu sumber perpecahan yang semakin berkembang antara partai-partai yang menjadi anggota federasi. Lihat: *ibid.*, hal. 78—82.

²⁴ Kekhawatiran golongan nasionalis sekuler yang lebih moderat dan kooperatif terhadap kemampuan golongan nasionalis nonkooperasi yang radikal dalam agitasi massa, membuat rencana pembuatan seksi lokal tersebut tidak terealisasi dan hanya digantikan dengan penunjukkan agen-agen secara resmi. Hal ini membuat kegiatan PPPKI terbatas pada rapat-rapat protes dan pamflet-pamflet yang bernada lantang. Lihat: *ibid.*

²⁵ Di luar PPPKI, aksi agitasi politik dan pengaruh PNI yang meluas di kalangan masyarakat bumiputra, mengundang peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Peringatan tersebut tidak ditanggapi oleh PNI sehingga memaksa pemerintah mengeluarkan tindakan keras. Tindakan tersebut adalah penangkapan para pemimpin PNI dan penggeledahan rumah serta kantor anggota PNI di seluruh wilayah Pulau Jawa pada tahun 1929. Pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah kolonial menangkap Pengurus Besar PNI di Bandung. Para pemimpin PNI yang ditangkap kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 1930 sampai dengan 29 September 1930. Hasil dari pengadilan tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Desember 1930 yang memutuskan hukuman penjara untuk para pemimpin PNI yang ditangkap. Tokoh-tokoh PNI yang ditangkap adalah Soekarno (Ketua PNI), Gatot Mangkoepredja, Inoe Perbatasari, Maskoen, Isqaq, Soekarni dan Soepriadinata. Lihat: *ibid.*, hal. 153

hubungan yang harmonis dengan kaum pergerakan nasional, baik yang berhaluan kooperasi maupun nonkooperasi. Ia memandang pergerakan nasional kaum bumiputra merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda sampai terciptanya pemerintahan yang demokratis.²⁶ Pemikiran De Graeff yang beraliran etis dan liberal mendapatkan banyak tantangan, seperti Pemberontakan PKI tahun 1926—1927 dan kegiatan agitasi politik PNI sepanjang akhir dasawarsa tahun 1920-an. De Graeff pada akhirnya terpaksa mengeluarkan kebijakan yang tegas meskipun sebenarnya ia menginginkan keharmonisan.

Tindakan reaktif pemerintah kolonial tersebut membuat PNI mengurangi kegiatan politiknya.²⁷ Hal itu mengundang keprihatinan dari Hatta yang masih berada di Negeri Belanda. Ia menyarankan agar anggota-anggota PNI yang masih tersisa tetap menjalankan partai seperti semula dan harus ditingkatkan kinerjanya agar PNI lebih kuat.²⁸ Surutnya aktivitas politik PNI kemudian dimanfaatkan oleh Kelompok Studi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya dalam pergerakan nasional yang sebelumnya didominasi oleh PNI. Soetomo melakukan beberapa pertemuan dengan pengurus inti sementara PNI pada pertengahan tahun 1930.²⁹ Pada kesempatan

²⁶ P.J.A. Idenburg, "Jawaban Belanda Atas Nasionalisme Indonesia", dalam *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, (editor H. Baudet dan I.J. Brugmans), (Jakarta, 1987), hal. 149.

²⁷ Pengurus Besar PNI, setelah penangkapan para pengurus intinya, segera dialihkan kepada Sartono dan Anwari dari cabang Batavia. Pada tanggal 9 Januari 1930, dikeluarkan perintah untuk mengurangi aktivitas politik partai ini selama menunggu hasil keputusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap tokoh PNI yang ditahan. Aktifitas partai dibatasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Lihat: John Ingleson, *op.cit.*, hal. 132.

²⁸ Soeharto, *op.cit.*, hal. 20.

²⁹ John Ingleson, *op.cit.*, hal. 137.

tersebut, Soetomo menyatakan usul untuk membubarkan PNI dan mengajak bergabung dengan kelompoknya untuk membentuk partai baru yang bersifat moderat tetapi tetap meneruskan cita-cita PNI secara perlahan. Usulan ini ditolak oleh Sartono selaku pengurus inti sementara PNI. Namun demikian ia tidak menolak sepenuhnya kemungkinan adanya kerja sama dengan kelompok nasionalis sekuler yang lebih moderat, seperti Kelompok Studi Indonesia, mengingat ketatnya pengawasan pemerintah kolonial terhadap gerakan nonkooperasi yang radikal.

Mohammad Hatta yang berada di Negeri Belanda juga menentang rencana penyatuan tersebut yang dianggap merupakan bagian dari strategi Soetomo untuk melemahkan komitmen penuh PNI terhadap prinsip nonkooperasi.³⁰ Pertemuan Pengurus Besar PNI dengan Kelompok Studi Indonesia pada akhirnya dihentikan setelah desas-desus mengenai pembubaran PNI dan kerja sama dengan kelompok studi tersebut muncul di dalam surat-surat kabar Indonesia.³¹

Keputusan Pengadilan Negeri Bandung yang memutuskan hukuman penjara bagi tokoh-tokoh PNI yang ditahan dan penolakan sidang banding mendorong pembubaran partai yang dilaksanakan dalam sebuah kongres luar biasa. Pembubaran PNI segera diikuti oleh pembentukan partai sekuler nonkooperasi yang baru. Pada tanggal 1 Mei 1931 terbentuk partai baru yang bernama Partai Indonesia (Partindo).³² Tujuan partai itu menyiratkan bahwa partai tersebut merupakan penerus PNI dan mengharapkan anggota lama PNI akan segera memasuki partai tersebut.

³⁰ Malvis Rose, *op.cit.*, hal. 89.

³¹ John Ingleson, *op.cit.*, hal. 138.

³² *ibid.*, hal.159—160.

Pembubaran dan pembentukan partai baru tersebut tidak disetujui sepenuhnya oleh mantan anggota PNI.³³ Mereka yang tidak setuju dengan Partindo mengadakan hubungan yang tidak resmi satu sama lain di kota-kota yang terdapat bekas cabang PNI yang besar seperti Batavia, Bandung, dan Surabaya.³⁴ Kelompok tersebut kemudian menamakan diri mereka sebagai “Golongan Merdeka”.³⁵ Perbedaan persepsi antara “Golongan Merdeka” dengan Partindo kemudian semakin melebar dan menuju tahap yang tidak dapat dipersatukan kembali.

Di pihak lain, kegagalan pertemuan dengan Sartono membuat Kelompok Studi Indonesia memperluas keanggotaannya dengan mengubah bentuk organisasi menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pada tanggal 4 Januari 1931.³⁶ Perubahan bentuk organisasi membuat keanggotaan PBI terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat bumiputra dan tidak hanya terbatas pada golongan ningrat intelektual terpelajar serta pegawai pemerintahan. Mengenai asas pergerakan kooperasi dan nonkooperasi tidak terlalu mempermasalahkan secara prinsip. Asas pergerakan ini

³³ Orang-orang yang tidak setuju tersebut adalah para pemimpin golongan tengah seperti Soedjadi, Moerad, Kantaatmaka, Bondan, Soekarto, dan lainnya. Lihat: Mohammad Hatta, *Memoir* (Jakarta, 2002), hal. 243.

³⁴ Di kota-kota tersebut, mantan anggota PNI yang kecewa mendirikan kelompok studi sebagai tempat berkumpul. Kelompok-kelompok studi yang didirikan antara lain Kelompok Studi Nasional Indonesia di Batavia oleh A.K. Pringgodigdo pada bulan Maret 1931, Kelompok Studi Rakyat Indonesia di Bandung pada bulan April 1931, Perhimpunan Kemajuan Kebangsaan Indonesia (PKKI) di Batavia pada bulan Mei 1931 oleh Soedjadi, Cabang dari PKKI di Surabaya pada bulan Juli 1931 oleh Atmadji, dan pembentukan Balai Pendidikan Indonesia. Selain kelompok studi yang telah disebutkan banyak pula kelompok-kelompok lain yang lebih kecil di kota-kota tersebut. Lihat: John Ingleson, *op.cit.*, hal. 162—163.

³⁵ Meskipun setiap kelompok mempunyai nama masing-masing, istilah “Golongan Merdeka” banyak digunakan oleh sebagian besar kelompok tersebut. Hal ini kemudian digunakan oleh pemerintah kolonial bukan hanya untuk digunakan menunjuk satu kelompok saja, namun semua kelompok mantan anggota PNI yang tidak setuju dengan Partindo secara kolektif. Lihat: *ibid.*

³⁶ *ibid.*, hal. 138—142.

dilihatnya hanya sebagai taktik saja. Menurut PBI persoalan dan perpecahan asas pergerakan hanya akan menambah penderitaan rakyat. Namun demikian asas nonkooperasi dapat menjadi pilihan pada saat sikap pemerintah kolonial melukai perasaan kebangsaan. Salah satu upaya perluasan anggota diarahkan kepada pembentukan cabang organisasi bernama Rukun Tani yang ditujukan untuk menampung para petani. Upaya ini menuai hasil dan puluhan ribu petani di Jawa Timur bergabung ke dalam organisasi ini. Pengaruh PBI yang meluas ke pedesaan membuat pemerintah kolonial khawatir dan melakukan pengawasan ketat terhadap PBI. Namun demikian, sifat PBI yang moderat dan tidak memperlihatkan sikap yang radikal dalam bidang politik membuat perkembangan organisasi ini dapat berjalan tanpa gangguan berarti.

Di Negeri Belanda, Hatta yang memang sejak awal sudah mengkritik langkah-langkah yang dijalankan oleh Sartono, yang secara tersirat dilakukan melalui surat terbuka yang dimuat di surat kabar bumiputra, memberikan dukungan kepada “Golongan Merdeka”.³⁷ Hatta dan Sjahrir berupaya menghimpun “Golongan Merdeka” ke dalam organisasi atau partai yang baru di luar Partindo.³⁸ Langkah ini dimulai dengan menerbitkan surat kabar yang dapat menjadi media aspirasi

³⁷ Pada pertengahan tahun 1931, Hatta sudah tidak lagi mendapatkan tempat di PI. Ia bersama Sjahrir disingkirkan oleh golongan komunis yang pengaruhnya meningkat di dalam PI. Penyingkiran tersebut berdasarkan perubahan politik golongan komunis untuk menghentikan kerjasama dengan golongan nasionalis yang kontra revolusioner. Pada pertengahan tahun 1931, Hatta bersama Sjahrir hendak terjun langsung dalam perjuangan politik di Hindia Belanda. Lihat: J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir* (Jakarta, 1993), hal. 42.

³⁸ Pemikiran untuk membentuk organisasi baru tersebut didorong oleh kekhawatiran akan pembebasan Soekarno yang kembali mempengaruhi orang-orang tersebut kembali kepada kelompok lamanya di bawah naungan Partindo. Lihat: John Ingleson, *op.cit.*, hal. 170.

“Golongan Merdeka”.³⁹ Pada tanggal 20 September 1931, edisi surat kabar yang menyuarakan pendapat “Golongan Merdeka” terbit di Batavia dan dinamakan *Daulat Ra’Jat*.⁴⁰ Setelah serangkaian pertemuan wakil-wakil “Golongan Merdeka” pada bulan Oktober 1931, konferensi pembentukan organisasi baru ditentukan waktunya pada bulan Desember 1931 di Yogyakarta. Hatta lalu mengutus Sjahrir untuk pulang ke Hindia Belanda dan ikut dalam konferensi tersebut dalam rangka mengambil alih kepemimpinan organisasi agar organisasi tersebut berada di dalam pengaruh Hatta dan Sjahrir.⁴¹ Hasil konferensi tersebut adalah berdirinya sebuah badan yang disebut Pendidikan Nasional Indonesia atau disebut PNI-Baru.⁴² Pimpinan sementara badan ini adalah Soekemi. Fokus dari badan ini untuk sementara dibatasi pada pendidikan untuk menghasilkan kader pergerakan nonkooperasi yang tangguh.⁴³

Pembentukan PNI-baru ini kemudian membawa aroma persaingan dengan Partindo dalam memperebutkan pengaruh yang dulu telah dibentuk oleh PNI. Soekarno yang telah dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931, berusaha untuk mempersatukan PNI-Baru dan Partindo. Usaha yang dilakukan oleh Soekarno tidak berhasil karena perbedaan yang tidak dapat dihilangkan dari kedua partai tersebut.

³⁹ Usaha ini dibantu oleh Soedjadi, yang sudah menghimpun orang-orang yang tidak setuju kepada pembubaran PNI. Sudjadi bersama Sukemi, pada saat konferensi pemimpin cabang yang diadakan pada bulan Mei 1931, merupakan pihak yang menolak pembubaran PNI. Soedjadi sendiri merupakan wakil resmi PI di Hindia Belanda dan secara rutin berhubungan surat menyurat dengan Hatta. Lihat: *ibid.*, hal. 159; Hatta, *op.cit.*, hal. 244.

⁴⁰ Penerbitan itu berisi pernyataan dari Klub Pendidikan Nasional Indonesia di Batavia, Malang, Surabaya dan Palembang. Pernyataan tersebut adalah penjelasan mengenai maksud pendirian klub tersebut yang bertujuan untuk menentang Partindo. Lihat: John Ingleson, *op.cit.*, hal. 170.

⁴¹ J.D. Legge, *op.cit.*, hal. 58.

⁴² *ibid.*; John Ingleson, *op.cit.*, hal. 170—173.

⁴³ Rudolf Mrazek, *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia* (Jakarta, 1996), hal. 143.

Soekarno sendiri pada akhirnya memilih untuk memasuki Partindo pada pertengahan tahun 1932. Bagi Partindo, bergabungnya Soekarno, membawa perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut tampak pada jumlah anggota Partindo yang bertambah secara pesat dalam kurun waktu setahun.⁴⁴

PNI-Baru kemudian diambil alih Sjahrir yang menggantikan Soekemi pada bulan Juni 1932, lalu diserahkan kepada Hatta yang sudah kembali ke Hindia Belanda pada bulan Agustus 1932.⁴⁵ Setelah Hatta bergabung dengan PNI-Baru, jumlah cabang meningkat. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah anggota, PNI-Baru masih kalah bersaing dengan Partindo. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggota yang direkrut dalam tiap cabang akibat penerapan kebijakan saring dan didik (*sift and educated*).⁴⁶

Namun, persaingan itu tidak berlangsung lama karena pada pertengahan tahun 1933, pemerintah kolonial kembali mengawasi secara ketat kedua partai nonkooperasi tersebut. Rapat-rapat yang diselenggarakan selalu diawasi polisi secara ketat sehingga kebebasan berbicara menjadi sangat terbatas. Penangkapan para pemimpin partai pun dilaksanakan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang akhir tahun 1932 sampai dengan awal tahun 1933, menjadi pemicu tindakan represif

⁴⁴ Pada permulaan bulan Februari 1932, dilaporkan bahwa Partindo mempunyai anggota kira-kira 3000 orang dan mempunyai tujuh cabang. Setelah Soekarno bergabung dengan Partindo dan memimpin partai tersebut, jumlah anggota menjadi sekitar 20.000 orang pada bulan Juli 1933. Lihat: John Ingleson, *op.cit.*, hal. 210.

⁴⁵ J.D. Legge, *op.cit.*, hal. 58.

⁴⁶ PNI Baru pada bulan Juni 1932 hanya mempunyai 12 cabang, tetapi pada bulan Februari 1933 meningkat menjadi 32 cabang penuh (26 cabang berada di Jawa), 10 calon cabang dan 24 cabang yang masih dalam persiapan. Meskipun mempunyai cabang yang cukup banyak, dari segi jumlah anggota, PNI Baru tertinggal dari Partindo. Hal ini tentu saja sesuai dengan bentuk PNI Baru sebagai partai yang mementingkan kaderisasi dan pendidikan anggotanya. Lihat: John Ingleson, *op.cit.*, hal. 199.

Gubernur Jenderal De Jonge.⁴⁷ Para pemimpin yang ditangkap kemudian dikenakan *exorbitant rechten* yang merupakan hak luar biasa gubernur jenderal untuk mengasingkan seseorang yang dianggap berbahaya untuk ketentraman di Hindia Belanda. Soekarno ditangkap pada bulan Juli 1933 dan kemudian diasingkan ke Flores pada awal Februari 1934. Penangkapan pemimpin Partindo ini kemudian diikuti dengan penangkapan pemimpin PNI-Baru, yaitu Hatta dan Sjahrir, pada bulan Februari 1934. Hatta dan Sjahrir kemudian dibuang ke Boven Digul pada awal tahun 1935.

Penangkapan kembali tokoh-tokoh berpengaruh dalam Partindo dan PNI-Baru membuat kedua organisasi tersebut menjadi lemah. Keadaan ini juga disebabkan oleh adanya larangan untuk mengadakan rapat di seluruh Hindia Belanda yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 1933 sehingga menyulitkan kedua organisasi tersebut untuk melakukan koordinasi.⁴⁸ PNI-Baru mencoba bangkit melalui kegiatan kursus-kursusnya dan kunjungan dari rumah ke rumah, tetapi hal ini diketahui oleh pemerintah dan dianggap sebagai aksi tersembunyi. Oleh karena itu, pada tahun 1936, anggota-anggota penting PNI-Baru yang tersisa segera ditangkap dan diasingkan.⁴⁹ Hal itu membuat PNI-Baru menjadi lumpuh dan hilang dengan sendirinya tanpa

⁴⁷ Peristiwa-peristiwa tersebut adalah protes pergerakan nasional terhadap Ordonansi “Sekolah Liar” Tahun 1932 dan Pemogokan awak kapal “De Zeven Provinciën”. Lihat: *ibid.*, hal. 226—234; De Jonge merupakan seorang tokoh penganut aliran konservatif. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal De Jonge, posisi kaum pergerakan nasional tidak diperhatikan. De Jonge menganggap rendah kaum nasionalis dan menganggap mereka sebagai produk-produk dari pemerintah kolonial yang tidak tahu berterimakasih serta merupakan bahaya bagi pemerintahan yang sehat dan damai di negeri jajahan. Lihat: John Ingleson, *op.cit.*, hal. 232.

⁴⁸ Soeharto, *op.cit.*, hal. 25.

⁴⁹ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta, 1994), hal. 129.

dibubarkan. Sementara itu, Partindo dibubarkan pada bulan November 1936 berdasarkan adanya usulan dari beberapa surat kabar seperti *Indonesia Berjuang* dan *Djawa Barat*.⁵⁰

Di lain pihak, PBI melakukan upaya kerjasama dengan Budi Utomo. Perkembangan rencana fusi dengan Budi Utomo terjadi pada kongres 18—21 April 1935 di Surabaya.⁵¹ Dalam kongres itu disetujui mengenai rencana fusi dengan Budi Utomo. Fusi kedua organisasi tersebut kemudian dilakukan pada kongres yang diadakan pada tanggal 24—26 Desember 1935 dengan nama baru Partai Indonesia Raya (Parindra).⁵² Soetomo yang merupakan Ketua PBI, terpilih menjadi Ketua Parindra yang pertama. Pada waktu kongres fusi berlangsung, Sarekat Sumatera dan Tirtayasa (perkumpulan orang Banten) ikut meleburkan diri. Pada tahun 1936, Partai Sarekat Selebes (Parsas) ikut bergabung. Tokoh-tokoh bumiputra yang cukup terkenal pada saat itu, seperti Mohammad Hoesni Thamrin (dari kaum Betawi), Mr. Soenarjo dan Mr. Iskaq Tjokroadisoerjo (dari Partindo) juga bergabung dengan Parindra.⁵³

⁵⁰ Usulan tersebut berupa pembubaran organisasi sayap kiri seperti Partindo dan PNI-Baru. Pembubaran tersebut kemudian segera diikuti dengan pembentukan front sayap kiri, disamping Parindra, yang menampung partai-partai sayap kiri. Saran yang terpenting adalah untuk tidak digunakannya cara yang radikal dan diganti dengan cara yang lunak sesuai dengan kondisi saat itu. Lihat: Soeharto, *op.cit.*, hal. 27.

⁵¹ A.K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hal. 111.

⁵² Parindra menganut politik perjuangan koperasi sesuai dengan partai-partai dan organisasi yang bergabung. Arah gerakan Parindra ditujukan kepada bidang sosial dan ekonomi, sementara itu gerakan dalam bidang politik masih disesuaikan dengan situasi dan tidak terlalu diutamakan. Lihat: *ibid.*, hal. 111—113.

⁵³ Soeharto, *op.cit.*, hal. 17.

B. Ordonansi “Sekolah Liar” Tahun 1932

Ketidakmampuan pemerintah kolonial dalam menyediakan kebutuhan pendidikan masyarakat bumiputra telah membuat perkembangan sekolah-sekolah partikelir berjalan sangat pesat. Pendidikan bangsa sendiri merupakan program hampir setiap organisasi politik, sosial, dan kebudayaan. Bentuknya beraneka ragam, berupa kursus-kursus pengetahuan umum tertulis dan lisan, kelompok-kelompok diskusi, kursus-kursus politik, perpustakaan umum dan sekolah-sekolah umum. Terutama pada sekolah-sekolah umum itu nampak penyesuaian dengan kurikulum pelajaran pemerintah, namun dasar-dasar pendidikan yang ingin dikembangkan berbeda dengan sekolah-sekolah pemerintah. Para pendirinya dengan sadar mengaitkan usaha pendidikannya dengan identitas kebudayaan bangsa dan tujuan gerakan nasional.⁵⁴

Sekolah-sekolah swasta yang bermunculan pada dasawarsa 1920-an sangat banyak. Kualitas sekolah-sekolah tersebut tentu saja tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menyebut sekolah-sekolah itu dengan istilah “sekolah liar”.⁵⁵ Namun, di antara sekolah-sekolah swasta yang muncul, ada pula sekolah-sekolah swasta yang dikelola dengan cukup baik sehingga mampu mencapai kualitas

⁵⁴ Abdurrahman Surjomihardjo, *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta, 1986), hal. 25—34.

⁵⁵ Istilah “Sekolah Liar” ini tidak dikenakan terhadap sekolah-sekolah Islam yang didirikan oleh Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya yang tidak dipandang tidak membahayakan. Pemerintah kolonial sendiri sudah membuat aturan mengenai sekolah-sekolah Islam yang dituangkan dalam Ordonansi Guru Tahun 1905. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah termasuk yang mendapat dukungan dan subsidi dari pemerintah kolonial karena kurikulumnya yang memasukan unsur pendidikan Barat. Lihat: Djohan Makmur, *et.al., Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan* (Jakarta, 1993), hal. 89.

pengajaran yang cukup baik. Sekolah-sekolah itu mampu bertahan walaupun terkadang mempunyai masalah pendanaan. Sekolah-sekolah tersebut adalah Sekolah Rakyat Sarekat Islam di Semarang, Sekolah Adhi Dharma di Yogyakarta yang juga didirikan oleh seorang tokoh SI yaitu Soerjopranoto, Ksatrian Institut di Bandung, Sekolah Kayu Tanam (*Indonesische Nederlandsche School*) yang didirikan pada tahun 1926 oleh Mohammad Sjafei atas permintaan pengurus Perkumpulan Bumiputra Perusahaan Kereta Api Negara, dan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara.⁵⁶ Sekolah-sekolah tersebut tidak mau menerima subsidi dari pemerintah kolonial. Mereka beranggapan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah kolonial merupakan sebuah alat kolonial untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengajaran. Selain itu, sekolah-sekolah tersebut tidak ingin mengikuti kurikulum yang sudah digariskan pemerintah kolonial.

Pertumbuhan dan perkembangan pesat sekolah-sekolah swasta tak bersubsidi dalam dasawarsa 1920-an telah mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang mengatur sekolah-sekolah swasta tersebut agar tetap berada di dalam pengawasan pemerintah kolonial. Peraturan awal mengenai pengawasan tersebut dibuat pada tahun 1923 berdasarkan usulan Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama, J.T.W. van der Meulen.⁵⁷ Namun demikian, tujuan dibuatnya peraturan tersebut tidak

⁵⁶ *ibid.*

⁵⁷ Pada pertengahan tahun 1922, Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama, J.T.W. van der Meulen mengirim surat rahasia kepada Gubernur Jenderal Fock. Rencana pengawasan itu didorong oleh hasil pengamatan van der Meulen yang menilai adanya pengaruh politik yang merusak dalam sekolah swasta bumiputra dan pengaruh nasionalisme Cina anti-Belanda dalam sekolah swasta Cina. Dalam surat rahasia tersebut van der Meulen berpendapat bahwa diperlukan tindakan pengawasan terhadap sekolah-sekolah partikelir yang didirikan oleh orang-orang bumiputra dan orang-orang Cina. Usulan

semata-mata ditujukan untuk menghambat perkembangan sekolah swasta, tetapi juga untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik yang memenuhi syarat peraturan yang dibuat.⁵⁸

Ordonansi pengawasan yang dibuat pada tahun 1923 kembali mengalami perubahan pada tahun 1925.⁵⁹ Perubahan itu ditujukan agar pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta tidak bersubsidi berjalan lebih efektif. Perubahan peraturan pengawasan yang menjadi semakin ketat ini didorong oleh adanya gerakan komunis yang semakin menguat, yang memanfaatkan keresahan masyarakat bumiputra yang kecewa terhadap pemerintah kolonial, termasuk mengenai kebijakan penghematan dalam pendidikan bumiputra.⁶⁰

Pada tahun 1929, ordonansi pengawasan terhadap sekolah swasta bumiputra tidak bersubsidi yang sudah dirumuskan pada tahun 1923 kembali diperdebatkan. Perdebatan yang terjadi adalah antara Direktur Pendidikan dan Agama, J. Hardeman dan Dewan Hindia Belanda (*Raad van Nederlands-Indie*). Saran yang dikeluarkan

van der Meuleun kemudian diterima oleh Gubernur Jenderal de Fock yang selanjutnya diwujudkan menjadi ordonansi dalam lembaran negara 1923 nomor 136. Pengawasan tersebut ditujukan kepada sekolah-sekolah swasta yang tidak mendapatkan subsidi, khususnya terhadap guru-guru yang mengajar. Para guru tersebut diwajibkan untuk melapor kepada kepala daerah setempat. Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 61—66.

⁵⁸ *ibid.*

⁵⁹ Masalah pengawasan terhadap sekolah-sekolah partikelir tidak bersubsidi dibicarakan lagi dalam nota direktur pengajaran, yang berpendapat bahwa di samping tindakan-tindakan terhadap guru-guru yang secara politik berbahaya, perlu dibuat peraturan-peraturan untuk mengurangi keburukan-keburukan pada sekolah liar. Perubahan-perubahan itu meliputi larangan mengajar yang diperluas mencakup bukan saja kepada guru-guru sekolah swasta, namun juga kepada orang-orang yang akan menjadi guru di sekolah swasta. Perubahan selanjutnya adalah mengenai waktu larangan mengajar yang menjadi tidak ditentukan larangannya. Selain itu kata "*kinderen*" (anak-anak) diubah menjadi "*personen*" (orang-orang) sehingga tercakup ke dalamnya larangan mengajar kepada orang dewasa. Lihat: *ibid.*, hal. 76.

⁶⁰ Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*, *op.cit.*, hal. 34—35.

oleh J. Hardeman, dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal De Graeff pada tanggal 23 April 1929, ialah bahwa belum tiba waktunya bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dan ia menyarankan agar pemerintah menunggu untuk melihat perkembangan sekolah swasta tidak bersubsidi lebih lanjut.⁶¹ Usul tersebut kemudian ditentang oleh Dewan Hindia Belanda yang menyatakan bahwa sangat diperlukan tindakan pembatasan terhadap sekolah swasta bersubsidi yang kian banyak jumlahnya dalam rangka melindungi masyarakat dari pendidikan yang bermutu rendah. Selain itu, peraturan yang telah ada selama ini dianggap bukan hambatan yang berarti bagi organisasi bumiputra yang bersifat nasionalistis yang menjalankan program pendidikan melalui sekolah-sekolah tersebut. Perdebatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan menelaah masalah tersebut lebih jauh oleh Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama B.J.O. Schrieke serta Komisi Pendidikan Bumiputra-Belanda (*Hollandsch Inlandsch Onderwijs Commissie*).⁶²

Permasalahan mengenai sekolah swasta itu kemudian dipelajari oleh B.J.O. Schrieke yang melanjutkan posisi J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan Agama. Hal itu didorong oleh pembubaran komisi yang tidak mampu memberikan anjuran secara pasti mengenai sikap pemerintah terhadap sekolah swasta bumiputra tidak bersubsidi. Dalam surat yang ditulis oleh B.J.O. Schrieke kepada Gubernur Jenderal De Jonge pada tanggal 13 Juni 1932 diajukan usulan agar masalah

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 127—129.

⁶² *ibid.*, hal. 130—132.

pengawasan terhadap sekolah swasta tidak bersubsidi kembali diperhatikan dan harus mengalami perubahan.⁶³

Perubahan-perubahan yang diajukan oleh B.J.O. Schrieke meliputi perubahan dalam Ordonansi Tahun 1923 yang tercantum dalam Lembaran Negara nomor 136 mengenai syarat “pemberitahuan guru” yang akan mengajar dalam sekolah swasta tidak bersubsidi kepada kepala pemerintahan daerah.⁶⁴ Syarat “pemberitahuan” diubah menjadi “pemberian izin” yang akan dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah berdasarkan pertimbangan serta persetujuan inspektur pendidikan dan pangreh praja. Selain itu, “pemberian izin” didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politis di mana pengajar tersebut tidak memiliki aktivitas politik yang dianggap berbahaya dan dapat memberikan pengaruh buruk kepada murid-muridnya. Pengawasan pemerintah tidak hanya terbatas pada para guru secara perorangan, tetapi juga diperluas keseluruhan sekolah. Perbedaan antara ordonansi pengawasan lama dengan ordonansi pengawasan baru terletak pada fungsinya, yakni ordonansi baru bersifat preventif, sedangkan ordonansi pengawasan yang lama bersifat represif.

Rancangan ordonansi kemudian diajukan kepada *Volksraad* pada tanggal 13 Agustus 1932. *Volksraad* kemudian menerima rancangan tersebut setelah diadakan

⁶³ Usulan ini terkait dengan daya tarik sekolah swasta tidak bersubsidi yang semakin besar bagi masyarakat bumiputra akibat kondisi ekonomi yang buruk di Hindia Belanda. Kualitas pendidikan yang diajarkan dalam kebanyakan sekolah swasta sangat buruk dan pada umumnya dianggap mencari keuntungan semata. Selain itu, tanpa pengawasan yang teratur, sekolah swasta dapat menanamkan pengaruh yang oleh pemerintah kolonial dianggap dapat mengganggu ketentraman. Lihat: *ibid.*, hal. 160—169.

⁶⁴ Perijinan mengajar ini mengikuti peraturan dalam Lembaran Negara 1880 nomor 21 mengenai pendidikan oleh orang Eropa kepada orang Bumiputra. Perizinan tersebut didasarkan atas pengetahuan minimum yang dimiliki oleh para pengajarnya. Lihat: *ibid.*

berbagai macam amandemen pada tanggal 9 September 1932. Schrieke, dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal De Jonge pada tanggal 13 September 1932, mengharapkan agar ordonansi tersebut segera diberlakukan apabila pemerintah sudah setuju dan mengusulkan agar ordonansi itu dimulai sejak tanggal 15 September 1932. Namun, ordonansi yang disebut *Toezicht-ordonantie Particulier Onderwijs* atau Ordonansi Pengawasan Pendidikan Swasta baru dimuat dalam *Staatsblad* No. 494 pada tanggal 17 September 1932 dan diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1932.⁶⁵ Sasaran yang dituju oleh ordonansi pengawasan sekolah swasta yang baru ini adalah untuk menghilangkan aspek negatif yang terdapat dalam sekolah-sekolah swasta. Aspek negatif tersebut antara lain tempat pengajaran yang tidak sehat, pengajar yang tidak berkualitas, biaya pendidikan yang tidak sepadan dengan pelajaran yang diberikan, nama sekolah yang tidak sesuai dengan kualitas pengajarannya, dan penggunaan nama sekolah pemerintah kolonial tetapi kualitas pengajarannya tidak sama dengan sekolah pemerintah kolonial.⁶⁶

Ordonansi itu ternyata menimbulkan reaksi di kalangan tokoh pergerakan nasional. Reaksi protes dipelopori oleh Ki Hadjar Dewantara, Pemimpin Persatuan Perguruan Taman Siswa. Ki Hadjar Dewantara memulai protes dengan mengirim telegram kepada Gubernur Jenderal De Jonge yang sedang berada di Bogor pada

⁶⁵ *ibid.*, hlm. 171.

⁶⁶ *Persatoean Indonesia*, 20—30 Oktober 1932 no. 154—155.

tanggal 1 Oktober 1932.⁶⁷ Isi telegram tersebut berisi pernyataan ketidaksetujuan Ki Hadjar Dewantara terhadap ordonansi baru yang dianggap dibuat secara tergesa-gesa dan dijalankan dengan paksaan, tanpa memahami keinginan masyarakat bumiputra. Ki Hadjar Dewantara juga menyatakan akan melakukan perlawanan sekuat-kuatnya dengan cara tidak memakai kekerasan atau disebut dengan *Lijdelijk Verzet*. Pada tanggal 3 Oktober 1932, Ki Hadjar Dewantara mengirim maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan nasional tentang ditetapkannya ordonansi baru yang berbahaya bagi pendidikan nasional dan sikap yang akan diambil oleh Taman Siswa terhadap ordonansi tersebut.⁶⁸

Maklumat yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara mendapat dukungan dari segenap organisasi dan partai politik bumiputra. Golongan peranakan Arab dan Tionghoa juga turut menyokong aksi itu dan melakukan rapat-rapat gabungan di Surabaya dan Pekalongan. Bagi partai-partai politik yang ada, terutama yang berhaluan nonkooperasi seperti Partindo dan PNI-baru, kasus Ordonansi “Sekolah Liar” merupakan suatu kesempatan lebih lanjut untuk menanamkan semangat anti pemerintah kolonial dan meningkatkan popularitas, serta pengaruh masing-masing organisasi.⁶⁹ Sementara itu salah satu tokoh pergerakan yang terkemuka seperti Hatta menganggap kasus Ordonansi “Sekolah Liar” merupakan sebuah momen untuk menyatukan semua organisasi politik dan nonpolitik ke dalam satu front dalam

⁶⁷ Sajoga, “Riwayat Perjuangan Taman-Siswa 1922—1952”, dalam *Taman-Siswa 30 Tahun*, (Jogjakarta, 1956), hal. 231; Lihat juga dalam Abdurrahman Surjomihardjo, *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*, *op.cit.*, hal. 105.

⁶⁸ Sajoga, *op.cit.*, hal. 231.

⁶⁹ John Ingleson, *op.cit.*, hal. 228.

perlawanan terhadap pemerintah.⁷⁰ Meskipun mempunyai pandangan yang bersifat politis dalam melihat kasus ordonansi itu, PNI-Baru dan Partindo juga menganggap ordonansi tersebut sebagai sebuah ancaman terhadap suatu bidang yang vital dalam gerakan kebangsaan. Sekolah-sekolah swasta tersebut, baik yang diselenggarakan oleh partai-partai politik maupun organisasi nonpolitik yang bersifat keagamaan atau kebudayaan, dianggap telah menanamkan nasionalisme Indonesia lebih dalam dan efektif daripada kegiatan-kegiatan lainnya.⁷¹

Tanggapan pemerintah kolonial dalam menghadapi aksi protes Ki Hadjar Dewantara dilakukan dengan diutusnya Kiewiet De Jonge, Kuasa Pemerintah untuk Soal-Soal Umum (*Regeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken*), oleh Gubernur Jenderal De Jonge untuk mengadakan pembicaraan dengan Ki Hadjar Dewantara di Yogyakarta.⁷² Tujuan pertemuan tersebut adalah berupaya meyakinkan Ki Hadjar Dewantara akan kegunaan dari ordonansi tersebut. Namun, pembicaraan tersebut menemui kegagalan karena Ki Hadjar Dewantara beserta Taman Siswa tidak akan melakukan kompromi sampai dibatalkannya pemberlakuan ordonansi tersebut dan penetapan syarat perizinan yang digantikan dengan syarat pemberitahuan.

Organisasi bumiputra yang menganut haluan koperasi dan moderat juga memberikan dukungan terhadap Taman Siswa dan aksi protes terhadap ordonansi baru tersebut. Pengurus besar PBI telah menyetujui dan mendukung sepenuhnya

⁷⁰ PNI-Baru juga menyiapkan tenaga-tenaga pengajar yang baru apabila guru-guru yang menjalankan *lijdelijk verzet* telah ditangkap. Lihat: Hatta, *Memoir*, hal. 274—275.

⁷¹ John Ingleson, *op.cit.*, hal. 228.

⁷² Pembicaraan tersebut berlangsung selama dua kali yakni pada tanggal 19 Oktober 1932 dan 21 Oktober 1932. Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 171—180.

sikap perlawanan pasif dari Taman Siswa.⁷³ Sementara itu, Budi Utomo yang didahului oleh cabangnya dari daerah Nganjuk juga menyatakan setuju terhadap perlawanan tersebut. PPPKI bersama dengan Muhammadiyah dan Budi Utomo menyelenggarakan pertemuan besar-besaran yang dihadiri lebih dari 10.000 orang untuk menyerukan pemerintah agar tidak melakukan ordonansi tersebut di daerah kesultanan.⁷⁴ Sepanjang bulan Oktober 1932 sampai Februari 1933, ribuan rapat protes diorganisasi di seluruh Jawa dan Sumatra oleh Taman Siswa dan juga dilakukan oleh hampir di setiap organisasi bumiputra mulai dari yang berhaluan kooperasi sampai yang berhaluan nonkooperasi.⁷⁵

Perlawanan terhadap ordonansi tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bumiputra saja, tetapi juga oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional di *Volksraad*.⁷⁶ Pada tanggal 8 Desember 1932, di dalam *Volksraad*, P.A.A. Wiranatakoesoema mengajukan usulan perubahan agar peraturan ordonansi tersebut diubah. Perubahan yang diajukan terletak pada sistem perizinan diubah menjadi sistem pemberitahuan. Selanjutnya, pemerintah disarankan untuk menggunakan cara represif, bukan preventif, yang berarti bahwa pemerintah diperbolehkan melakukan tindakan apabila sudah terjadi kesalahan. Namun demikian, pemerintah kolonial

⁷³ Guru-guru yang menjadi anggota PBI diharuskan setuju dengan perlawanan tersebut dan apabila mempunyai sikap yang tidak setuju akan segera dikeluarkan keanggotaannya dari partai. Lihat: Sajoga, *op.cit.*, hal. 234.

⁷⁴ Pengurus pusat Budi Utomo dan Pasundan juga mengeluarkan ancaman akan meninggalkan kursi *volksraad* apabila ordonansi tersebut tidak dicabut sampai dengan tanggal 1 Maret 1933. Lihat: Abdurrahman, *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*, *op.cit.*, hal. 108—109; Hatta, *op.cit.*, hal. 274—275.

⁷⁵ John Ingleson, *op.cit.*, hal. 229.

⁷⁶ Sajoga., *op.cit.*, hal. 236—238.

menyatakan bahwa ordonansi tersebut tidak dapat dicabut karena telah ditetapkan dan pemerintah tetap bersikukuh bahwa ordonansi tersebut tidak bermaksud politis.

Tanggal 10 Januari 1933, Wiranatakoesoema bersama dengan tokoh-tokoh bumiputra dalam *volksraad* mengajukan mosi yang isinya sebagai berikut:⁷⁷

- a. Menarik kembali *onderwijs ordonnantie* untuk 1 tahun lamanya.
- b. Mengesahkan kembali ordonansi yang lama untuk 1 tahun.
- c. Mengangkat suatu komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap untuk diajukan kepada pemerintah dalam waktu 1 tahun.

Mosi tersebut diajukan melalui sebuah ultimatum, yakni semua anggota *volksraad* yang berasal dari Budi Utomo dan Pasundan mengancam akan keluar. Usulan tersebut pada akhirnya diterima dengan tidak dipungut suara meskipun terdapat beberapa perubahan yang bersifat teknis. Rapat istimewa *Raad van Indie* diadakan untuk mempelajari situasi dan mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan ordonansi. Namun, Menteri Urusan Jajahan Simon de Graaff mengusulkan agar pemerintah bertindak dengan hati-hati dan penuh kebijaksanaan terhadap gelombang protes tersebut. Pemerintah Hindia Belanda setuju dengan saran Menteri Urusan Jajahan dan menerima usul *Volksraad* untuk membatalkan sistem perizinan bagi guru-guru di sekolah partikelir tidak bersubsidi. Pada tanggal 13 Februari 1933 keluar keputusan, menurut keputusan Gubernur Jenderal tanggal 13 Februari 1933 no.18, untuk membatalkan ordonansi sebelumnya dan berlaku mulai

⁷⁷ *ibid.*

21 Februari 1933.⁷⁸ Keputusan ini ditanggapi oleh Ki Hadjar Dewantara dengan maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1933 yang berisi anjuran agar kaum bumiputra tetap awas dan kembali bekerja menuju alam organisasi.⁷⁹

Ordonansi “Sekolah Liar” selain menarik perhatian pergerakan nasional juga menarik perhatian pers bumiputra. Pers bumiputra, baik yang netral maupun yang dinaungi oleh organisasi bumiputra tertentu, mengeluarkan sikap dan opini serta memuat peristiwa yang berkaitan dengan ordonansi tersebut walaupun tidak semua frekuensi pemberitaannya merata. Pers bumiputra juga memegang peranan dalam memperluas aksi protes terhadap Ordonansi “Sekolah Liar”.

C. Hubungan antara Surat Kabar Bumiputra dan Pergerakan Nasional

Pers memiliki kedudukan penting dalam pergerakan nasional seumumnya. Meskipun bersifat komunikasi satu arah, pers melalui media surat kabarnya memiliki potensi untuk membangkitkan kesadaran kolektif kaum bumiputra terhadap status sosial, pendidikan, dan politik.⁸⁰ Menurut Sartono Kartodirdjo, pergerakan nasional dan pers merupakan dua bidang kegiatan yang saling terkait.⁸¹ Apabila pergerakan nasional dipandang sebagai sebuah proses mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi dalam perjuangan mewujudkan cita-cita nasional, maka fungsi pokok pergerakan itu melalui organisasi-organisasinya adalah mensosialisasikan politik di kalangan rakyat.

⁷⁸ *ibid.*

⁷⁹ *ibid.*

⁸⁰ Sartono, Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, jilid 2, (Jakarta, 1999), hal. 112—117.

⁸¹ *ibid.*

Upaya sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui pers dengan menerbitkan surat kabar. Meskipun sudah ada kesempatan untuk mengadakan pertemuan dan rapat besar, surat kabar mampu melakukan proses sosialisasi lebih efektif yang disebabkan oleh tersedianya forum yang berkelanjutan dan intensif.

Peran pers yang cukup penting lainnya adalah memberikan pengaruh kepada kalangan terpelajar bumiputra lulusan sekolah pemerintah kolonial atau biasanya disebut sebagai golongan priyayi.⁸² Kalangan tersebut pada umumnya tidak memiliki kesadaran politik yang memadai akibat sistem pendidikan kolonial yang memberikan hambatan terhadap proses pendewasaan politik dan mengaburkan kesadaran identitas bumiputra sebagai orang yang terjajah. Kalangan priyayi yang baru lulus dari sekolah pemerintah kolonial pada umumnya belum berkembang perhatiannya terhadap dunia politik. Cita-citanya masih dipengaruhi oleh pemikiran tradisional yakni menjalani pendidikan modern hanya untuk menjadi priyayi yang bekerja di kantor-kantor pemerintah kolonial. Perhatian kalangan tersebut terhadap dunia politik mulai terbuka melalui pendidikan politik dalam bentuk berita dan artikel dalam surat kabar yang diterbitkan oleh organisasi bumiputra berorientasi pergerakan nasional. Bagi kalangan pergerakan nasional yang menerbitkan surat kabar, kemampuan baca tulis dan kebiasaan para priyayi membaca surat kabar memudahkan proses sosialisasi tersebut. Sedangkan bagi kalangan priyayi sendiri, membaca surat kabar merupakan sebuah daya tarik yang besar terkait dengan pandangannya yang melihat produk Barat sebagai salah satu syarat yang wajib diikuti dalam perubahan menuju status yang

⁸² *ibid.*

lebih baik.⁸³ Namun demikian, upaya membangkitkan kesadaran di kalangan priyayi ini kemudian disertai dengan adanya segmentasi dalam pergerakan nasional menurut aliran politik, kepentingan golongan, serta kelompok sosial lainnya.⁸⁴

Menurut Hatta, pers dengan politik tidak dapat dipisahkan.⁸⁵ Pers merupakan sarana rakyat bumiputra untuk melawan kekuasaan pemerintah kolonial yang sewenang-wenang. Dalam hal itu, pers mempunyai fungsi sebagai media yang harus mengetahui keluh kesah rakyat bumiputra dan kemudian disampaikan kepada pemerintah kolonial yang tidak demokratis. Di negeri jajahan seperti Hindia Belanda, Hatta menyatakan pers bumiputra, baik yang beraliran netral maupun politik, harus tetap menjalankan kewajibannya untuk selalu menerangi rakyat bumiputra dan mempertahankan haknya serta memberikan gambaran mengenai perjuangan rakyat jajahan di negeri lain yang berjuang untuk mencari kemerdekaan.

Pers yang bertugas sebagai salah satu sarana pendidikan politik bagi rakyat bumiputra sudah berjalan cukup baik semenjak tumbuhnya organisasi-organisasi yang cukup radikal pada dasawarsa kedua abad ke-20. Hal itu sangat membantu tumbuhnya massa yang berpikir kritis dalam rakyat bumiputra, tumbuhnya kesadaran kolektif, dan solidaritas umum, sehingga pergerakan nasional sebagai sebuah proses aksi kolektif mendapat dukungan kuat.⁸⁶ Potensi pers semacam ini menggerakkan berbagai aliran dalam pergerakan nasional untuk menerbitkan surat kabar sendiri

⁸³ Ahmat Adam, *op.cit.*, hal. 135—149.

⁸⁴ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 112—117.

⁸⁵ *Daulat Ra'jat*, 10 November 1932 edisi no. 42.

⁸⁶ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 112—117.

yang mempunyai peran sebagai media penyalur aspirasinya masing-masing. Pers bumiputra yang berpolitik tersebut pada dasarnya memperjuangkan hak rakyat bumiputra serta memberikan pendidikan politik, tetapi baik secara langsung maupun tidak langsung tetap memberikan pengaruh sesuai dengan nilai dasar masing-masing organisasi.

